

Progress Report Reformasi Birokrasi



Area Perubahan 3 Penataan Organisasi

Disampaikan oleh:
Rahmad Budiaji
Koordinator Area Perubahan 3

Progress Rencana Aksi

01

Asessment organisasi berbasis kinerja

Monitoring dan Evaluasi organisasi sesuai dengan Permenpan RB No 20 Tahun 2018

Dimensi	Skor	Level Lembaga	Satu Tingkat Di Bawah Lembaga			
			Deputi Bidang Persidangan	Deputi Bidang Administrasi	Badan Keahlian	Inspektorat Utama
STRUKTUR						
Kompleksitas	25	17,61	19,32	17,045	10,8	19,89
Formalisasi	12,5	9,375	10,27	9,821	8,482	11,16
Sentralisasi	12,5	11,93	10,23	11,65	11,65	11,08
TOTAL	50	38,92	39,81	38,51	30,93	42,13
PROSES						
Alignment	10	8,438	8,75	9,375	7,813	9,688
Governance and Compliance	10	7,5	7,857	8,571	8,929	10
Perbaikan dan Peningkatan Proses	10	6,875	7,5	6,875	8,75	7,5
Manajemen Risiko	10	7,5	7,083	7,5	8,333	10
Teknologi Organisasi dan IT	10	8	8	8,5	8,5	9,5
TOTAL	50	38,31	39,19	40,82	42,32	46,69
Peringkat Komposit	100	77,2329	79,0037	79,336	73,249	88,814

Progress Rencana Aksi

02

Restrukturisasi kelembagaan
IP berdasarkan hasil
asesment

Kajian Penyederhanaan Birokrasi

Januari – Juni 2022

Penyusunan kajian penataan organisasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti adanya perubahan ketentuan perundang-undangan dan usulan dari unit kerja

Juni – Desember 2022

Penyusunan kajian penataan penyederhanaan birokrasi untuk menindaklanjuti Surat MenPAN&RB Nomor B/21/M.RB.05/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Penyesesuaian Tunjangan Kinerja

Progress Rencana Aksi

03

Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi

Penyusunan usulan Penyederhanaan Birokrasi

Revisi Persekjen terkait Organisasi dan Tata Kerja

Penyusunan usulan
Penyederhanaan Birokrasi

Disampaikan melalui Surat Nomor B/12117/OT.01/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Usulan Penataan Organisasi Setjen DPR RI

Revisi Persekjen terkait
Organisasi dan Tata Kerja

Menunggu undangan ekspose penataan organisasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Nomor : B/ 19 /M.RB.06/2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2021

7 Maret 2022

YTH. BAPAK SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DI
JAKARTA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI tahun 2021 adalah **77,19** dengan kategori "**BB**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	18,32	18,32
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,98	5,76
	III. Reform	30,00	22,24	21,10
	Total Komponen Pengungkit	60,00	47	45,18

Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPAN&RB

Surat MenPAN&RB Nomor B/19/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022

Menyusun mekanisme hubungan antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) dengan jabatan fungsional

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Biro sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam rangka menindaklanjuti PermenPAN&RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi direncanakan akan dilakukan penyusunan pedoman tersebut yang dimulai dengan mengundang narasumber dan penyusunan kajian



Thank
you